

Nomor : B/1024/S.PP.99/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (Dua) Dokumen
Hal : **Pengarahan Menteri PANRB Percepatan
Pembangunan Mal Pelayanan Publik**

02 September 2023

Yth.

**KEPALA DAERAH
(daftar terlampir)**

di

Tempat

Merujuk pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/94/M.PP.01/2023, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Bapak Menteri PANRB berkenan memberikan arahan secara langsung kepada seluruh Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota yang daerahnya belum meresmikan MPP sebagaimana daftar terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kegiatan akan dilaksanakan secara daring (*zoom meeting*), pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 6 September 2023
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Zoom Meeting (Meeting ID: 797 101 7779 | Passcode:
MPP2023)

Selain itu kiranya Kepala Daerah dapat didampingi oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas PTSP atau pejabat yang ditunjuk untuk turut hadir pada kegiatan dimaksud. Mohon Bapak/Ibu Kepala Daerah dapat hadir tepat waktu dan memberikan konfirmasi kehadiran melalui tautan berikut (s.id/percepatan-mpp). Untuk informasi lebih lanjut silakan dapat menghubungi narahubung (Sdr. Gege 085729915803) atau (Sdri. Raissa 081298127762).

Atas kerja sama dan perhatiannya, disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RINI WIDYANTINI
Sekretaris Kementerian
NIP. 196505291990032001

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230901QILY

**Daftar Daerah Penerima Surat
Kegiatan Pengarahan Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik
oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

No.	Provinsi	Jumlah	Kabupaten/Kota
1.	Kepulauan Bangka Belitung	7	Kabupaten Bangka
			Kabupaten Bangka Barat
			Kabupaten Bangka Selatan
			Kabupaten Bangka Tengah
			Kabupaten Belitung
			Kabupaten Belitung Timur
			Kota Pangkalpinang
2.	Kalimantan Tengah	14	Kabupaten Barito Selatan
			Kabupaten Barito Timur
			Kabupaten Barito Utara
			Kabupaten Gunung Mas
			Kabupaten Kapuas
			Kabupaten Katingan
			Kabupaten Kotawaringin Barat
			Kabupaten Kotawaringin Timur
			Kabupaten Lamandau
			Kabupaten Murung Raya
			Kabupaten Pulang Pisau
			Kabupaten Sukamara
			Kabupaten Seruyan
			Kota Palangkaraya
3.	Maluku	11	Kabupaten Maluku Tengah
			Kabupaten Maluku Tenggara
			Kabupaten Maluku Tenggara Barat
			Kabupaten Seram Bagian Barat
			Kabupaten Seram Bagian Timur
			Kabupaten Kepulauan Aru
			Kabupaten Maluku Barat Daya
			Kabupaten Buru Selatan
			Kota Ambon
			Kota Tual
			Kabupaten Buru
4.	Maluku Utara	10	Kota Tidore Kepulauan
			Kabupaten Halmahera Barat
			Kabupaten Halmahera Tengah
			Kabupaten Halmahera Selatan
			Kabupaten Halmahera Timur
			Kabupaten Kepulauan Sula
			Kabupaten Pulau Morotai

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230901QILY



			Kabupaten Pulau Taliabu
			Kota Ternate
			Kabupaten Halmahera Utara
5.	Papua	8	Kabupaten Jayapura
			Kabupaten Biak Numfor
			Kabupaten Yapen
			Kabupaten Keerom
			Kabupaten Sarmi
			Kabupaten Waropen
			Kabupaten Supiori
			Kabupaten Mamberamo Raya
6.	Papua Selatan	4	Kabupaten Merauke
			Kabupaten Asmat
			Kabupaten Mappi
			Kabupaten Boven Digoel
7.	Papua Pegunungan	8	Kabupaten Jayawijaya
			Kabupaten Pegunungan Bintang
			Kabupaten Tolikara
			Kabupaten Yahukimo
			Kabupaten Mamberamo Tengah
			Kabupaten Yalimo
			Kabupaten Lanny Jaya
			Kabupaten Nduga
8.	Papua Tengah	8	Kabupaten Mimika
			Kabupaten Nabire
			Kabupaten Paniai
			Kabupaten Puncak Jaya
			Kabupaten Puncak
			Kabupaten Dogiyai
			Kabupaten Intan Jaya
			Kabupaten Deiyai
9.	Papua Barat	7	Kabupaten Manokwari
			Kabupaten Teluk Wondama
			Kabupaten Teluk Bintuni
			Kabupaten Fak-fak
			Kabupaten Kaimana
			Kabupaten Manokwari Selatan
			Kabupaten Pegunungan Arfak
10.	Papua Barat Daya	6	Kota Sorong
			Kabupaten Sorong
			Kabupaten Sorong Selatan
			Kabupaten Tambrauw
			Kabupaten Maybrat
			Kabupaten Raja Ampat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230901QILY



Rundown Kegiatan

Pengarahan Menteri PANRB Percepatan Pembangunan Mal Pelayanan Publik

Rabu, 6 September 2023

Waktu (WIB)	Agenda
08.30 – 09.00	Peserta Memasuki Zoom Meeting
09.00 – 09.05	Pembukaan oleh MC/Moderator
09.05 – 09.20	Laporan Deputi kepada Menteri PANRB terkait Pelaksanaan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
09.20 – 10.20	Arahan Menteri PANRB terkait Percepatan Pembangunan Mal Pelayanan Publik
10.20 – 10.50	Sesi Tanya Jawab
10.50 – 11.00	Penutup

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230901QILY